

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda wilayah Asia Timur dan Tenggara tidak terkecuali Indonesia berasal dari pertumbuhan ekonomi di Asia, terutama di kawasan Asia Timur dan Tenggara yang telah mengalami kemajuan cukup pesat. Pertumbuhan ekonomi itu telah mengakibatkan kawasan *emerging market* ini memerlukan banyak dana untuk investasi. Kebutuhan akan dana untuk investasi dapat dilihat dari besarnya tingkat suku bunga di kawasan ini. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam tingkat suku bunga, yang kemudian diikuti Filipina, Thailand dan Korea Selatan. Ini berarti Indonesia sangat membutuhkan uang (*Surabaya Post, Senin, 5 Januari 1998*).

Kebutuhan dana investasi yang cukup besar itu telah mendorong negara-negara di Asia, terutama di Asia Tenggara mencari dana pinjaman di luar negeri. Hal ini disebabkan adanya kemudahan yang diberikan oleh pihak asing dalam mengalirkan dana pinjaman kepada negara-negara di Asia Timur dan Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Di samping tingginya suku bunga akibat kebutuhan dana, juga adanya *Tight Money Policy*, serta kemudahan dari pihak asing dalam memberikan pinjaman dana, yang menyebabkan meningkatnya hutang luar negeri Indonesia. Peningkatan hutang di Indonesia sebagian besar berada pada

pemerintah. Sebagian besar proyek berjangka panjang banyak didanai oleh hutang luar negeri dalam jangka pendek. Mereka memprediksi mampu membayar dalam jangka pendek, sehingga tidak terjadi distorsi dalam jangka panjang. Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi yang sekarang terjadi.

Sejak Juli 1997 sampai April 1998, Indonesia menghadapi berbagai krisis, yakni krisis nilai tukar Rupiah, krisis perbankan dan krisis pasar modal. Semua ini bersumber pada krisis kepercayaan pada perekonomian Indonesia. Di tengah krisis inilah, pemerintah melakukan reformasi di bidang perbankan, salah satunya adalah dengan melakukan likuidasi terhadap 16 perbankan nasional pada hari Sabtu, Nopember 1997 (*Swasembada No. 22/ XIII/ 20 Nopember - 3 Desember 1997*). Hal ini ternyata bereaksi negatif bagi masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional menjadi kandas. Mulailah terjadi *rush* pada sebagian besar perbankan nasional, dana masyarakat banyak yang dilarikan ke bank-bank di luar negeri yang diperkirakan ada sebesar US\$ 80 miliar (*Kontan No. 19, 9 Februari 1998*), dipindahkan ke bank-bank asing di dalam negeri, bank-bank milik pemerintah, bahkan ada yang disimpan “bawah bantal” (*Jawa Pos, Minggu, 22 Februari 1998*), ada yang diinvestasikan dalam bentuk tanah dan rumah-toko (*Jawa Pos, Selasa, 27 Januari 1998*). Sementara permintaan akan dolar makin tinggi, banyak orang yang menahannya, bahkan arus modal dolar justru meninggalkan Indonesia karena dianggap sudah tidak menguntungkan lagi untuk investasi. (*Kontan No. 19, 9 Februari 1998*). Adanya protes dari pemilik bank yang terkena likuidasi sempat menjatuhkan nilai

Rupiah, karena dijadikan alasan bagi investor untuk melepas Rupiah (*Kompas, Kamis, 6 Nopember 1997*).

Selain itu, kepanikan masyarakat sempat terjadi lagi akibat bergulirnya isu tentang meninggalnya **Soedono Salim**, hingga sempat terjadi *rush* besar-besaran pada Bank Central Asia miliknya. Selanjutnya, adanya isu atas meninggalnya Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VI **Mar'ie Muhammad**, juga sempat menyebabkan semakin menurunnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar US dan Indeks Harga Saham Gabungan (*Kompas, Selasa, 18 Nopember 1997*). Bahkan, pada waktu pemerintah mengumumkan *merger*-nya bank-bank pemerintah tanggal 31 Desember 1997, juga disambut *rush* oleh masyarakat (*Jawa Pos, Senin, 23 Februari 1998*). Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat saat ini sangat rentan terhadap isu, walaupun berbagai upaya intensif telah dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat luas (*Kompas, Selasa, 18 Nopember 1997*). Salah satu langkah yang diambil oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional adalah dengan melakukan pembayaran dana nasabah dari 16 bank yang dilikuidasi (*Kompas, Minggu, 22 Februari 1998*). Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan terhadap keselamatan uang deposan, penabung, dan kreditur selama dua tahun. Selaras dengan hal tersebut, pemerintah juga berusaha untuk menyetatkan perbankan nasional dengan membentuk Badan Penyetatan Perbankan Nasional (*Jawa Pos, Rabu, 28 Januari 1998*). Sementara itu, untuk menarik Rupiah yang diparkir di luar negeri, pemerintah telah memasang suku bunga yang menggoda

(*Kontan No. 19, 9 Februari 1998*). Hal ini diyakini bahwa dapat menarik dana-dana yang terparkir di luar negeri.

Persoalan krisis ekonomi yang terjadi saat ini tidak dapat dipisahkan dari persoalan politik, keduanya saling terkait. Oleh karena itu, dalam saat krisis ekonomi, isu politik memiliki kekuatan yang sangat besar di dalam kehidupan masyarakat. Dalam situasi krisis moneter seperti saat ini misalnya, isu menurunnya kesehatan mantan Presiden Republik Indonesia **H. Muhammad Soeharto**, bahkan sampai isu wafatnya Beliau menimbulkan kepanikan pada masyarakat, baik masyarakat awam, maupun pelaku pasar valuta asing dan pasar modal (*Swasembada No. 03/ XIV/ 5-18 Februari 1998*).

Kepanikan dalam bidang ekonomi dan politik tersebut juga mengimbas pada gejala sosial, yang ditandai dengan maraknya kerusuhan di beberapa daerah di Indonesia dan berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun masyarakat.

Pada saat yang hampir bersamaan pula, dimana nilai tukar Rupiah terhadap Dolar US semakin merosot, telah membawa dampak yang luas dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, harga-harga barang terutama harga kebutuhan pokok meningkat drastis. Hal ini bukan saja dirasakan oleh masyarakat kelas bawah, melainkan juga dirasakan oleh masyarakat kelas menengah atas.

Pada masa krisis ekonomi seperti saat ini, sebagian besar masyarakat kelas menengah atas juga ikut mengencangkan ikat pinggang (*Kontan No. 8, 17 Nopember 1997*). Kepanikan masyarakat semakin meningkat dengan adanya

isu-isu ketidak stabilan politik, seperti akan ada kudeta di Indonesia. Selain itu juga adanya isu kelangkaan barang kebutuhan sehari-hari (*Surabaya Post, Sabtu, 10 Januari 1998*). Isu-isu itulah yang menjadi salah satu penyebab yang mendorong masyarakat melakukan *rush* terhadap barang-barang kebutuhan pokok di supermaket-supermaket dan toko-toko kelontong, yang tepatnya terjadi pada tanggal 8 Januari 1998 di seluruh kota-kota besar di Indonesia, karena masyarakat merasa tidak ada cara lain yang dapat dilakukan, kecuali membeli barang-barang kebutuhan pokok sebanyak-banyaknya.

Hal tersebut menyebabkan kepanikan pada pemilik supermaket dan toko kelontong, mengingat bagaimanapun juga mereka perlu menjaga kelancaran arus dan persediaan barang mereka. Bahkan, pemilik supermarket dan toko kelontong sempat menutup toko mereka sebelum waktunya, yang mana tidak hanya terjadi pada salah satu supermarket atau toko kelontong saja, tetapi hampir semuanya (*Jawa Pos, Jumat, 9 Januari 1998*). Akhirnya, para pemilik supermaket menetapkan kebijaksanaan, yaitu menetapkan jatah pembelian bagi masyarakat yang melakukan pembelian barang-barang kebutuhan pokok (*Kontan No. 17, 19 Januari 1998*). Ternyata, kebijaksanaan tersebut justru membuat masyarakat menjadi panik, walaupun pemerintah telah menjamin bahwa persediaan barang kebutuhan pokok masih melimpah ruah meskipun harga terus bergerak naik (*Kompas, Rabu, 31 Desember 1997*).

Pada golongan masyarakat menengah dan menengah atas, meskipun kini harga barang-barang kebutuhan hidup menjadi selangit dan pembeliannya dibatasi, konsumen golongan ini masih tampak berjubel. Mereka khawatir bilamana tidak membeli

menutup toko mereka sebelum waktunya, yang mana tidak hanya terjadi pada salah satu supermarket atau toko kelontong saja, tetapi hampir semuanya (*Jawa Pos, Jumat, 9 Januari 1998*). Akhirnya, para pemilik supermarket menetapkan kebijaksanaan, yaitu menetapkan jatah pembelian bagi masyarakat yang melakukan pembelian barang-barang kebutuhan pokok (*Kontan No. 17, 19 Januari 1998*). Ternyata, kebijaksanaan tersebut justru membuat masyarakat menjadi panik, walaupun pemerintah telah menjamin bahwa persediaan barang kebutuhan pokok masih melimpah ruah meskipun harga terus bergerak naik (*Kompas, Rabu, 31 Desember 1997*).

Pada golongan masyarakat menengah dan menengah atas, meskipun kini harga barang-barang kebutuhan hidup menjadi selangit dan pembeliannya dibatasi, konsumen golongan ini masih tampak berjubel. Mereka khawatir bilamana tidak membeli sekarang, maka harga-harga ini justru lebih melangit, dan yang lebih dikhawatirkan lagi adalah apabila sampai terjadi kelangkaan barang (*Surabaya Post, Sabtu, 10 Januari 1998*).

Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya tidak luput dari kejadian-kejadian di atas. Dengan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada tahun-tahun sebelumnya serta pembangunan di segala bidang, secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakat Surabaya. Dalam situasi krisis ekonomi seperti saat ini, sebagian kalangan menengah atas di Surabaya juga mengalami berbagai macam kepanikan sehingga menimbulkan pola perilaku rumah tangga yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pengalokasian *asset*nya.

2. Rumusan Masalah

Rumus masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut sejauh mana dampak krisis ekonomi terhadap perilaku rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan alokasi *asset*-nya di Surabaya.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Di dalam membahas tujuan dan masalah penelitian ini, akan dikaitkan antara dampak perilaku dengan dampak krisis-krisis ekonomi yang muncul antara lain adalah:

- (a) Untuk mengetahui perilaku rumah tangga golongan ekonomi menengah atas kelompok pribumi dan WNI etnis tionghoa dalam persentase penggunaan pendapatan perbulan pada saat sebelum dan saat krisis ekonomi.
- (b) Untuk mengetahui perilaku rumah tangga golongan ekonomi menengah atas kelompok pribumi dan WNI etnis tionghoa dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga berdasarkan kebiasaan jumlah dan jangka waktu pada saat sebelum dan saat krisis ekonomi.
- (c) Untuk mengetahui perilaku rumah tangga golongan menengah atas kelompok kelompok pribumi dan WNI etnis tionghoa dalam pengalokasian *asset financial* dan *asset non financial* pada saat sebelum dan saat krisis ekonomi.

b. Manfaat

Pada dasarnya penelitian ini akan memberikan manfaat pada dua hal, yaitu:

(1) Secara Teori

Menambah khasanah kepustakaan di bidang manajemen pemasaran khususnya dalam menganalisa perilaku rumah tangga kelas menengah atas terhadap dampak krisis ekonomi.

(2) Secara Terapan

Memberikan referensi sebagai data penelitian lebih lanjut untuk dikembangkan.